

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerahnya, Pemerintah Kabupaten TTU membutuhkan sarana dan prasarana yang salah satunya adalah kantor pemerintahan. Kantor Pemerintah Kabupaten sebagai wadah dari aktivitas/kegiatan pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan melayani kepentingan umum di wilayah Kabupaten.

Bentuk susunan pemerintah daerah ditetapkan Undang-Undang (UUD 45 Bab IV pasal 18), dimana Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah otonom dan dalam penjelasan umum Nomor 22 Tahun 1999 pasal 4 disebutkan:

Dalam rangka pelaksanaan Azas Desentralisasi di bentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, untuk tujuan tersebut maka daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya sendiri.

Untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam pembangunan khususnya Kabupaten TTU diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah kantor pemerintah yang representatif. Sebagai kantor pemerintahan, bangunan perkantoran harus memiliki karakteristik bentuk yang

spesifik. Dalam menjalankan rumah tangganya sendiri pemerintah daerah memerlukan Kantor Bupati sebagai kantor pusat rumah tangga daerahnya.

Bangunan ini ditunjukkan untuk memwadhahi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Bangunan kantor yang memadai diharapkan dapat menciptakan sistem atau mekanisme kinerja instansi pemerintah yang lebih terintegrasi dan menyeruluh, mewujudkan pola layanan

pada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Secara visual, kantor pemerintah harus mampu mencerminkan suatu lambang kedudukan pusat pemerintah.

Pemerintahan Kabupaten TTU dalam upaya mewujudkan visi dan misinya selalu melaksanakan penyempurnaan, pendayagunaan dan penataan terhadap keseluruhan unsur sistem pemerintahan pada pokoknya meliputi penataan organisasi, penataan disiplin manajemen, penyempurnaan terhadap masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. Keadaan Kantor Bupati TTU sendiri saat ini sudah tidak memenuhi syarat, dimana bangunan sudah mulai menua dan tanpa perawatan. Selain itu lokasi instansi-instansi pemerintahan yang tersebar serta terletak tidak pada satu lingkungan sehingga menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan umum.

Mengatasi yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan tersebut, untuk itu diperlukan suatu perencanaan Kantor Bupati yang mampu memberi ciri khas pada bangunan pemerintahan tersebut. Adapun yang menjadi penekanan perencanaan bangunan pemerintahan ini adalah pendekatan Arsitektur Neo Vernacular, dengan harapan agar konsep Neo-Vernacular ini menjadi ciri khas tersendiri yang mampu menjadi daya tarik bagi pengguna bangunan, maka diperlukan konsep sesuai dengan pertimbangan untuk kantor Bupati yang nantinya diharapkan mampu menjadi *landmark* di daerah tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang terdapat pada perencanaan Kantor Bupati TTU menggunakan pendekatan neo-vernakular , diantaranya:

- a. Penerapan Arsitektur Neo-Vernacular pada bentuk dan tamplan bangunan Kantor Bupati Kabupaten TTU yang nantinya dapat menampilkan ciri khas, dan identitas dari daerah tersebut.
- b. Tampilan Kantor Bupati TTU perlu diambil nilai-nilai budaya lokal, khususnya yang ada di Kabupaten TTU.
- c. Penempatan Kantor Bupati dalam satu kawasan perkantoran sesuai dengan pembagian wilayah Kota Kefamenanu.
- d. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan dan pelakunya untuk menentukan kebutuhan ruang, dari segi perluasan ruang, penataan massa bangunan, kelengkapan fasilitas, maupun kulaitas arsitekturnya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari perencanaan kantor bupati TTU sebagai berikut:

- a. Bagaimana merencanakan bangunan Kantor Bupati Kabupaten TTU dapat mewadahi seluruh aktivitas seluruh aktivitas didalamnya ?
- b. Bagaimana penerapan konsep pendekatan Arsitektur Neo Vernacular pada bangunan Kantor Bupati Kabupaten TTU?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

- a. Untuk merencanakan bangunan Kantor Bupati Kabupaten TTU yang dapat mewadahi seluruh aktivitas, baik pelayanan pemerintahan ataupun aktivitas penunjang didalamnya.
- b. Untuk menerapkan konsep pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular pada kantor Bupati Kabupaten TTU.

1.4.2 Sasaran

Sasaran dari penulisan makalah ini adalah menyusun landasan konsep program perencanaan dan perancangan Kantor Bupati Kabupaten TTU sebagai landasan konseptual bagi perancangan Gedung Kantor Bupati Kabupaten TTU dengan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

1.5.1 Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan difokuskan pada gagasan yang tepat untuk mengungkapkan suatu wadah Kantor Bupati yang berlokasi di Kabupaten TTU. Dengan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular yang berorientasi pada kegiatan yang mewadahi kegiatan pemerintahan TTU , pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan pemerintahan di Kabupaten TTU ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur dan bidang ilmu penunjang lainnya.

1.5.2 Batasan

Pembahasan terbatas pada bangunan Kantor Bupati dengan memberikan penjelasan untuk mengarahkan dalam perancangan sesuai dengan penekanan masalah dibidang arsitektural mengenai perencanaan bangunan berupa bentuk, penampilan, penataan ruang dalam dan ruang luar sesuai dengan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular . Lokasi tapak disesuaikan rencana dengan ruang lingkup perilaku dan kebutuhan pelayanan akan sebuah pemerintahan mencakup daerah Kabupaten TTU.

1.6 Metodologi

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan tujuan memperoleh data-data untuk diolah dalam merencanakan dan merancang Kantor Bupati Kabupaten TTU

Tabel 1.1 Tabel Kebutuhan Data

No	Jenis Data	Sumber Data	Metode	Kebutuhan Analisa
1	Data administratif dan Geografis	<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA TTU• Kantor Bupati TTU	Wawancara, Observasi	<ul style="list-style-type: none">• Analisa tapak,
2	Melakukan studi banding dengan obyek studi sejenis	Studi Pustaka	<ul style="list-style-type: none">• Studi Literatur	<ul style="list-style-type: none">• Utilitas bangunan• Bangunan• Program ruang• Tampilan bangunan
3	Foto/Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">• Observasi langsung pada lokasi perencanaan• Studi banding obyek sejenis	<ul style="list-style-type: none">• Observasi dan Tinjauan lokasi	<ul style="list-style-type: none">• Kondisi eksisting tapak• Desain sejenis yang telah ada

No	Jenis Data	Sumber Data	Metode	Kebutuhan Analisa
4	Data Struktur dan Konstruksi Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Buku-buku, jurnal ilmiah, pedoman perencanaan struktur dan konstruksi bangunan • Studi banding obyek sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Literatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Struktur
5	Data Kantor Bupati	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal ilmiah, buku-buku • Studi banding obyek sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Literatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan ruang/ studi ruang • Kegiatan administratif • Kebutuhan fasilitas • Tampilan bentuk bangunan

Sumber : Penulis, 2021

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

- a. Data Primer

- Studi lapangan (survey)

Secara langsung melakukan survey ke lapangan, dalam hal ini untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya secara nyata/pasti dan terperinci. Data-data yang akan di ambil adalah sebagai berikut :

- Letak dan luas lokasi
- Keadaan iklim
- Geologi
- Vegetasi
- Hidrologi
- Peruntukan lahan berdasarkan pembagian BWK
- Keadaan lingkungan non-fisik sekitar lokasi
- Kondisi arsitektur sekitar lokasi perencanaan

- Wawancara

Melakukan proses wawancara dan konsultasi dengan beberapa pihak (responden) yang berkompeten secara bebas (tidak melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang tersistematis), baik instansi pemerintah maupun swasta, serta masyarakat sekitar untuk mendapatkan berbagai masukan serta data-data penunjang yang diperlukan dalam perencanaan.

- Pengambilan Gambar

Melakukan pengambilan gambar yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran data-data dan menjadikan sebuah dokumentasi. Pengambilan gambar yang dilakukan yaitu: lokasi perencanaan, situasi daerah sekitar, vegetasi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan ilmu arsitektur/perencanaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara langsung pada saat di lokasi (data penunjang) yang didapat dari instansi-instansi terkait, perseorangan dan literatur lainnya. Dengan kata lain data sekunder berupa data literatur (*library search*), yang merupakan data hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori yang relevan dengan kenyataan di lapangan dan topik perencanaan.

1.6.3 Metode Analisa

Dari data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu penyelesaian. Adapun analisa tersebut terdiri atas analisa kualitatif dan analisa kuantitatif.

a. Analisa Kuantitatif

Analisa hubungan sebab akibat, penentuan masalah, penentuan dan konsep dalam kaitan dengan penciptaan suasana yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan gedung kantor Bupati TTU.

Analisa ini diorientasikan pada:

- Perletakkan bangunan yang sesuai dengan pembagian BWK
- Menciptakan bangunan sesuai dengan budaya TTU sehingga kantor bupati dapat menjadi *lanmark*.
- Pola sirkulasi vertikal maupun horizontal harus di rencanakan secara teliti guna menciptakan kesan nyaman dan aman bagi pengguna saat beraktivitas.

b. Analisa Kualitatif

Analisa ini dilakukan dengan membuat perhitungan – perhitungan tertentu berdasarkan sebab akibat studi sesuai dengan tahapan deskripsi, reduksi dan seleksi yang dibuat guna

menentukan besaran atau luasan ruang guna memenuhi kebutuhan ruang.

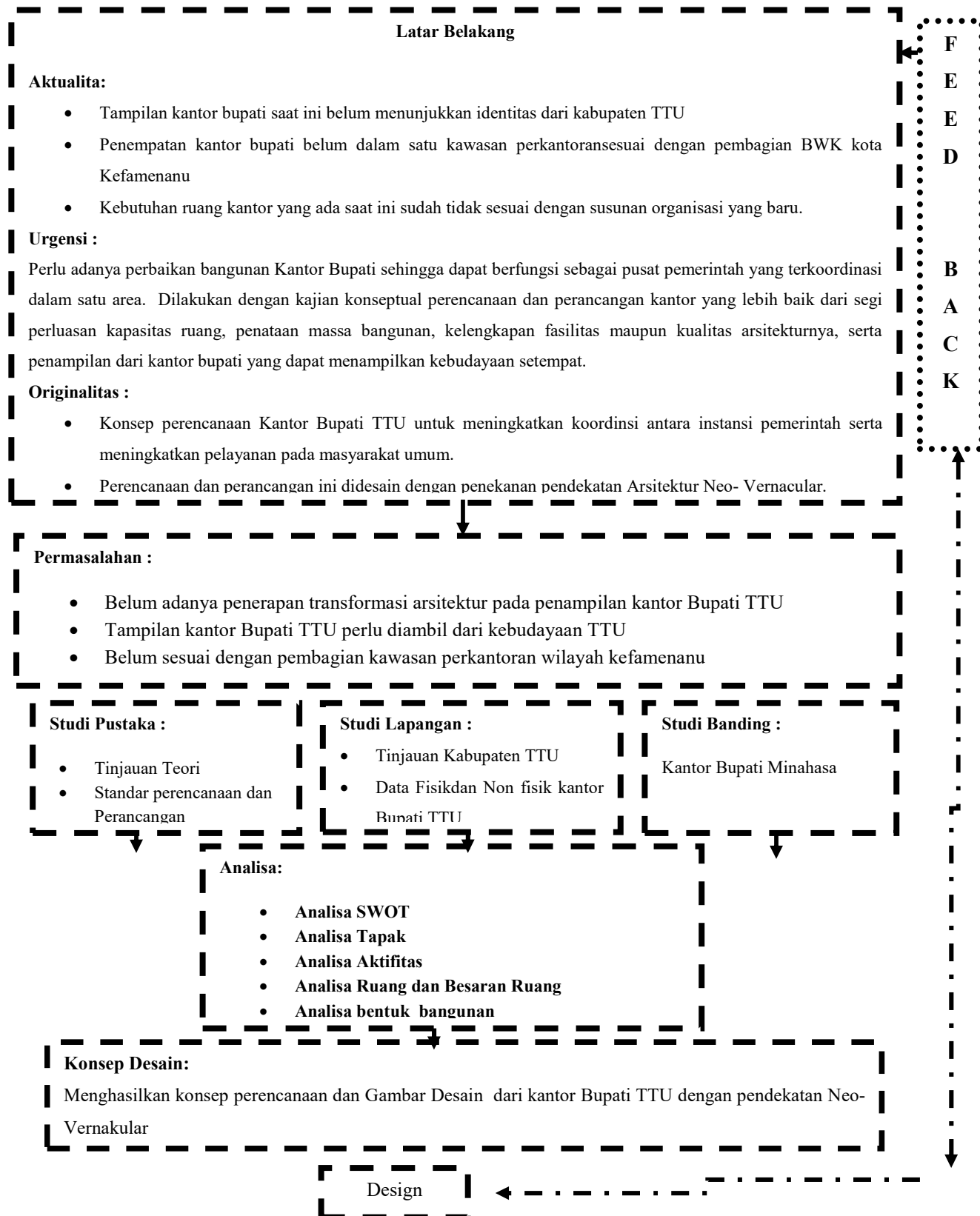
Analisa ini diorientasikan pada :

- Kebutuhan ruang dan perlengkapan ruang
- Besaran ruang
- Jumlah pengguna bangunan/ruang
- Inventarisasi aktivitas dan kegiatan
- Material
- Bentuk dan tampilan bangunan

1.6.4 Keluaran Yang Dihasilkan

Tahap akhir perencanaan dan perancangan gedung kantor bupati TTU di kefamenanu dengan pendekatan Arsitektur Neo-Vernacular adalah menghasilkan bangunan dan kawasan yang optimal, dan penampilan bentuk bangunan yang identik dengan budaya TTU.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam perencanaan pembangunan kantor Bupati TTU dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Mengurai secara garis besar mengenai perencanaan pembangunan kantor bupati TTU dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular , yang didalamnya meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan batasan serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Mengurai tentang teori-teori yang dipakai untuk mendukung perencanaan pembangunan kantor bupati TTU serta studi banding dari kantor bupati dari daerah lainnya.

Bab III Tinjauan Lokasi

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi perencanaan, data yang berkaitan dengan Kantor Bupati, gambaran lokasi perencanaan.

Bab IV Analisa

Bab ini meliputi Analisa Tapak, Analisa Aktivitas, Analisa Kebutuhan Ruang dan Besaran Ruang, Analisa Struktur, Analisa Bentuk, dan Analisa Tema/Pendekatan.

Bab V Konsep

Merupakan uraian dari Konsep Dasar, Konsep Tapak, Konsep Perencanaan Bangunan, Konsep Struktur dan Konsep Utilitas.